



**SISTEM PERFORMANSI DALAM FORMULA UPAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PELAKSANAAN JAM KERJA BAGI AWAK MOBIL TANGKI  
(AMT) BAHAN BAKAR MINYAK PADA PT "Z"**

Vandika Febrian Maulana<sup>1</sup>, Nailul Amany<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis metode perhitungan formula upah yang diberikan melalui sistem performansi pada PT "Z" dapat memberikan pelindungan hukum bagi Awak Mobil Tangki (AMT) Bahan Bakar Minyak; 2) menganalisis implikasi sistem performansi terhadap pelaksanaan jam kerja yang diberlakukan kepada Awak Mobil Tangki (AMT) ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan, serta mengkajinya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan memberikan keterangan atas sistem performansi, serta implikasinya terhadap waktu kerja bagi Awak Mobil Tangki (AMT). Penulisan hukum ini menganalisis dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian Penulis menganalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem sistem performansi tidak memberikan pelindungan hukum secara ekonomis bagi Awak Mobil Tangki (AMT). Ketiadaan pelindungan hukum tersebut merupakan implikasi dari adanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terhadap penetapan upah atas satuan hasil. Selanjutnya, dengan diberlakukannya sistem performansi berimplikasi pada ketidaksesuaian penerapan waktu kerja ketika perusahaan memberlakukan waktu kerja khusus. Terhadap ketetapan waktu tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan hukum oleh perusahaan dalam menentukan golongan jabatan tertentu. Alhasil, Awak Mobil Tangki (AMT) selama ini tidak pernah mendapatkan upah lembur. Oleh karena itu, perlu adanya pelindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi Awak Mobil Tangki (AMT).

**Kata Kunci: sistem performansi, waktu kerja, pelindungan hukum, pemenuhan hak pekerja, Awak Mobil Tangki (AMT)**

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata (S-1) Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Sistem Performansi dalam Formula Upah dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Jam Kerja bagi Awak Mobil Tangki (AMT) Bahan Bakar Minyak pada PT "Z"  
Vandika Febrian Maulana, Nailul Amany S.H., M.H.  
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**PERFORMANCE BASED WAGE AND ITS IMPLICATIONS ON THE  
WORKING HOURS IMPLEMENTATION FOR THE FUEL OIL TANKER  
CREWS (AMT) AT PT “Z” COMPANY**

Vandika Febrian Maulana<sup>1</sup>, Nailul Amany<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to: 1) identify and analyze the determination of wages through the performance system and assess whether it provides legal protection for Tanker Crews (AMT) at PT “Z” company; 2) analyze the implications of the performance system on the implementation of working hours applied to Tanker Crews (AMT) in terms of legislation.*

*This research is normative-empirical in nature, examining the issues that arise in the field and comparing them with the applicable legal provisions. This legal writing is descriptive, providing information on the performance system and its implications for the working hours of Tanker Crews (AMT). The study analyzes two types of data: primary data obtained through field studies involving interviews with respondents and secondary data obtained through literature reviews, followed by qualitative data analysis techniques.*

*This study concludes that the performance-based system does not provide legal protection for Tanker Crews (AMT). The absence of such protection is a consequence of legal uncertainty (rechtsonzekerheid) in the determination of wages based on unit-based results. Furthermore, the implementation of the performance-based system has led to inconsistencies in the application of working hours, particularly when the company enforces a special working time policy. The establishment of this working time regulation indicates legal non-compliance by the company in classifying certain job positions. As a result, Tanker Crews (AMT) have never received overtime compensation. Therefore, it is imperative to establish legal protection and ensure the fulfillment of rights for Tanker Crews (AMT).*

**Keywords:** *performance system, working time, legal protection, workers' rights fulfillment, Tanker Crews (AMT).*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata (S-1) Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta